

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN  
(LKj-IP)**

**KECAMATAN DUA PITUE**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK-jIP) Kecamatan Dua Pitue Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dua Pitue tahun 2023 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

Tanrutedong, 15 Januari 2024  
Camat Dua Pitue

**ANDI SAMMANG, SH., MH**  
NIP. 19711030 200212 1 005

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                            | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                | ii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                         | 1  |
| 1.1 Latar Belakang                               | 1  |
| 1.2 Maksud dan Tujuan                            | 1  |
| 1.3 Gambaran Umum Organisasi                     | 2  |
| 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi                       | 2  |
| 1.5 Komposisi SDM Organisasi                     | 5  |
| 1.6 Isu Strategis                                | 8  |
| 1.7 Landasan Hukum                               | 10 |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                | 11 |
| 2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dua Pitue | 11 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023                | 13 |
| 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)                | 13 |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>             | 15 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi                   | 15 |
| 3.2 Realisasi Anggaran                           | 29 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                            | 41 |
| 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja           | 41 |
| 4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja          | 41 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan

mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menindak lanjuti dengan menertibkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

### **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Dua Pitue adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKj-IP ini dapat menjadi salah



satumasukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

### **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Kecamatan Dua Pitue adalah salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah  $\pm$  70.60 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk  $\pm$  30 ribu jiwa dimana sebagian masyarakatnya mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian berdasarkan kondisi dan karakteristik geografis wilayahnya. Adapun jarak kecamatan Dua Pitue yang berkedudukan Ibu Kotanya berada di Tanrutedong.

### **1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### ***Tugas***

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
  1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;
  5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
  7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
  8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Fungsi**

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian; Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.

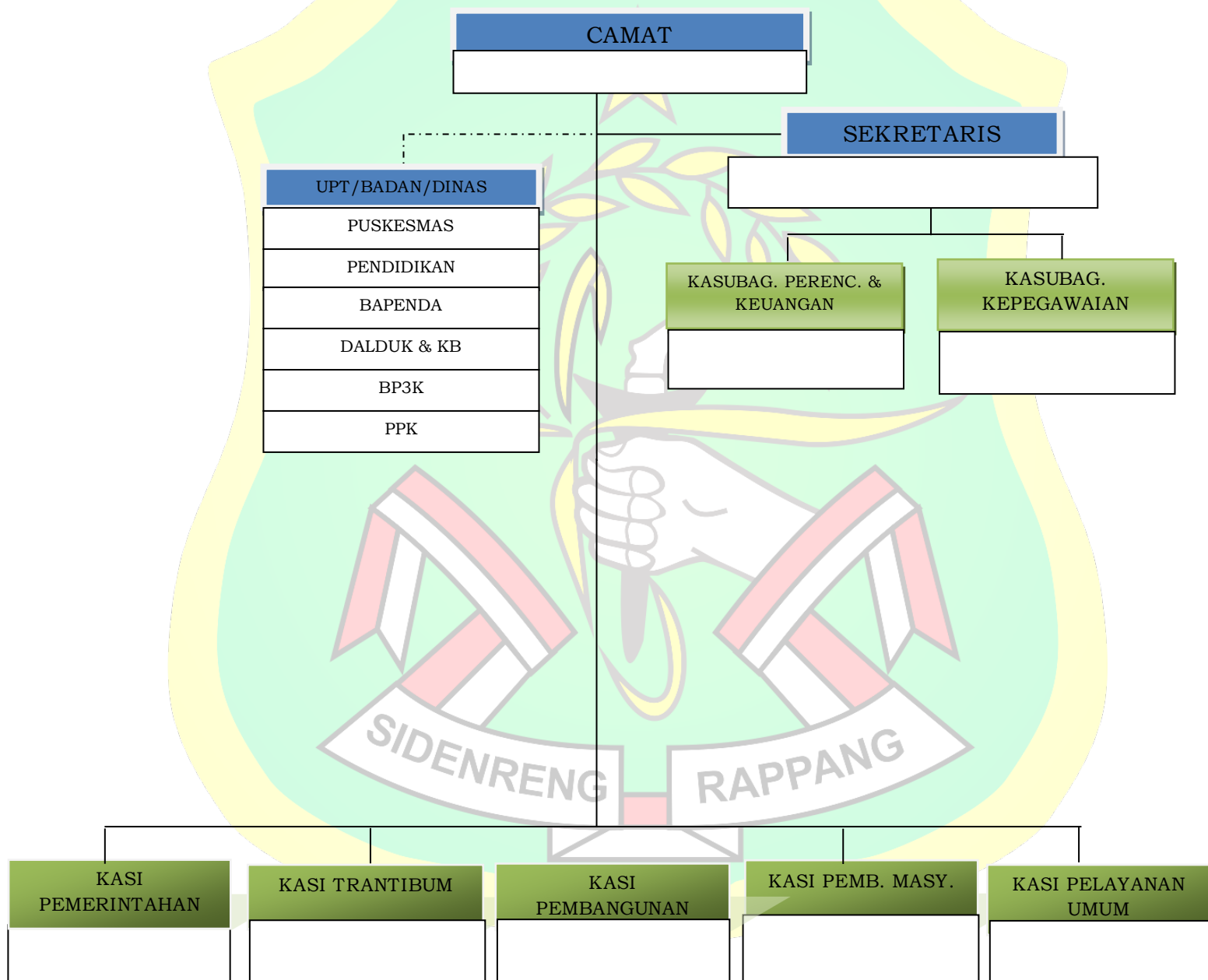
Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Dua Pitue sebanyak 14 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 6 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Dua Pitue dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :



Struktur Organisasi  
PEMERINTAH KECAMATAN DUA PITUE  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG





Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Dua PituE terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

### **1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI**

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Dua PituE memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Dua PituE adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Dua PituE memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut

#### **Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kantor Kecamatan Dua PituE memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Dua PituE terdiri dari 8 (delapan) orang Laki-laki

dan 14 ( empat belas) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Gender  
Kantor kecamatan Dua PituE Tahun 2023

| No.           | Uraian                        | Jumlah    | Laki     | Perempuan |
|---------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1.            | ASN KANTOR<br>CAMAT DUA PITUE | 13        | 6        | 7         |
| 2.            | ASN KANTOR<br>KEL.TANRUTEDONG | 5         | 1        | 4         |
| 3.            | ASN KANTOR<br>KEL.SALOMALLORI | 4         | 2        | 2         |
| <b>JUMLAH</b> |                               | <b>22</b> | <b>9</b> | <b>13</b> |

Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Dua PituE sangat terbatas dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Dua PituE dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas ASN dilingkup pemerintah Kecamatan Dua PituE dibantu oleh tenaga Non ASN.

**Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan**

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Dua PituE dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Dua PituE. Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan  
Kantor Kecamatan Dua PituE  
Tahun 2023

| No.           | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah    | Laki     | Perempuan |
|---------------|------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1.            | S2                     | 4         | 3        | 1         |
| 2.            | S1                     | 15        | 5        | 10        |
| 3.            | D3                     | 0         | 0        | 0         |
| 4.            | SLTA                   | 3         | 1        | 2         |
| <b>JUMLAH</b> |                        | <b>22</b> | <b>9</b> | <b>13</b> |

**Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon**

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Dua PituE sebanyak 18 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun ASN. menurut jenjang eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Dua PituE dijelaskan dalam tabel di bawah ini

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon  
Kantor Kecamatan Dua PituE  
Tahun 2023

| NO. | NAMA                       | JK | JABATAN                           | ESELON |
|-----|----------------------------|----|-----------------------------------|--------|
| 1   | Andi Sammang, SH., MH      | L  | Camat                             | III    |
| 2   | Muhlisar, S.Sos, M. Si     | L  | Sekcam                            | III    |
| 3   | Edy Purwanto, S. STP       | L  | Kasi Pemerintahan                 | IVa.   |
| 4   | Suriani Mustafa, S. IP     | P  | Kasi Pemberdayaan Masyarakat      | IVa.   |
| 5   | Abdul Halim, SE.           | L  | Kasi Trantib                      | IVa.   |
| 6   | Suardi, S.Sos,. M.Amd.KP   | L  | Kasi Pembangunan                  | IVa.   |
| 7   | Dra. Andi Ampellang        | P  | Kasi Pelayanan Umum               | IVa.   |
| 8   | Wahyuni, ST                | P  | Kasubag. Perencanaan dan Keuangan | IVb.   |
| 9   | Suriati, SE                | P  | Kasubag. Kepegawaian              | IVb.   |
| 10  | Andi Sunggu, SE            | P  | Lurah                             | IVa.   |
| 11  | Samsuriati, SE,. Amd. Pemb | P  | Sekertaris                        | IVb.   |
| 12  | Hj. Sujiati, SE            | P  | Kasi Pemerintahan                 | IVb.   |
| 13  | Andi Herlina, S. Sos,.     | P  | Kasi Pembangunan                  | IVb.   |
| 14  | Muhammad Yahya, SE         | L  | Kasi Trantib                      | IVb.   |
| 15  | Suharto, S. IP             | L  | Lurah                             | IVa.   |
| 16  | Zainal, SE                 | L  | Sekertaris                        | IVb.   |
| 17  | Nurlina, S. Sos            | P  | Kasi Trantib                      | IVb.   |
| 18  | Andi Evayanti, S. IP       | P  | Kasi Pemerintahan                 | IVb.   |

Sedangkan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang non Eselon dijelaskan pada tabel berikut ini :

Komposisi ASN Non Eselon  
Kantor Kecamatan Dua PituE  
Tahun 2023

| NO. | NAMA            | JK | JABATAN                            |
|-----|-----------------|----|------------------------------------|
| 1.  | Astina, ST      | P  | Analisis Pemerintahan              |
| 2.  | Ida Ilmiati. D. | P  | Bendahara Pengeluaran              |
| 3.  | Daris           | L  | Bendahara Pembantu BTL-Gaji        |
| 4.  | Egonita         | P  | Pengelola pemanfaatan milik daerah |

**Komposisi ASN Menurut Golongan**

Komposisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Dua PituE menurut golongan Tahun 2023. ASN di Kecamatan Dua PituE sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Orang dimana golongan IV sebanyak 2 (Dua) orang, Golongan III sebanyak 19 (Dua Puluh) Orang dan Golongan II sebanyak 3 (Tiga) Orang. ASN Kecamatan Dua PituE Menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Komposisi ASN Menurut Golongan  
Kantor Kecamatan Dua PituE  
Tahun 2022

| No | Uraian       | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Golongan IV  | 2         | 1         | 3      |
| 2. | Golongan III | 4         | 12        | 16     |
| 3. | Golongan II  | 1         | 2         | 3      |

**1.6 ISU STRATEGIS**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia,

prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Dua PituE dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Dua PituE kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Dua PituE dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur



serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2022 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

### **1.7 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dua PituE Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dua PituE**

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Dua PituE mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2018 –2023. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 11 Desember 2023, 061/0676/Org. perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

#### **Visi**

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H.DOLLAH MANDO (Bupati) – Ir. H. MAHMUD YUSUF (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Sidrap tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

***“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”***

#### **Misi**

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas OPD Kecamatan Kulo berada pada misi 5 yaitu “

**Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance”** sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

| Visi   | <b>Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera</b>                                    |   |                |                |                |                 |                 |
|--|--|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Misi 5   | <b>Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance</b> |   |                |                |                |                 |                 |
| Tujuan   | Sasaran  | Indikator   | Target         |                |                |                 |                 |
|  |  |   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023            | 2024            |
| <b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b> |  | Indeks Kepuasan masyarakat  | 77,59          | 81,09          | 82,45          | 84,01           | 85,59           |
|  | Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan  | Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 0              | 0              | 100%           | 100 %           | 100 %           |
|  | Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi  | Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan                   | 0              | 0              | 72 %           | 73 %            | 100 %           |
|  | Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan  | Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.                         | 0              | 0              | 100%           | 100 %           | 100 %           |
|  | Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan  | Predikat Nilai Sakip  | 33,89<br>( C ) | 36,39<br>( C ) | 40,25<br>( C ) | 50,75<br>( CC ) | 58,80<br>( CC ) |

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Dua Pitue untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi :

- a. Meningkatkan Kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan Publik
- b. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa terhadap proses pembangunan
- c. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
- d. Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan

2. Arah Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
- d. Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan yang baik.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian kinerja diperjanjikan antara Camat dan Bupati terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

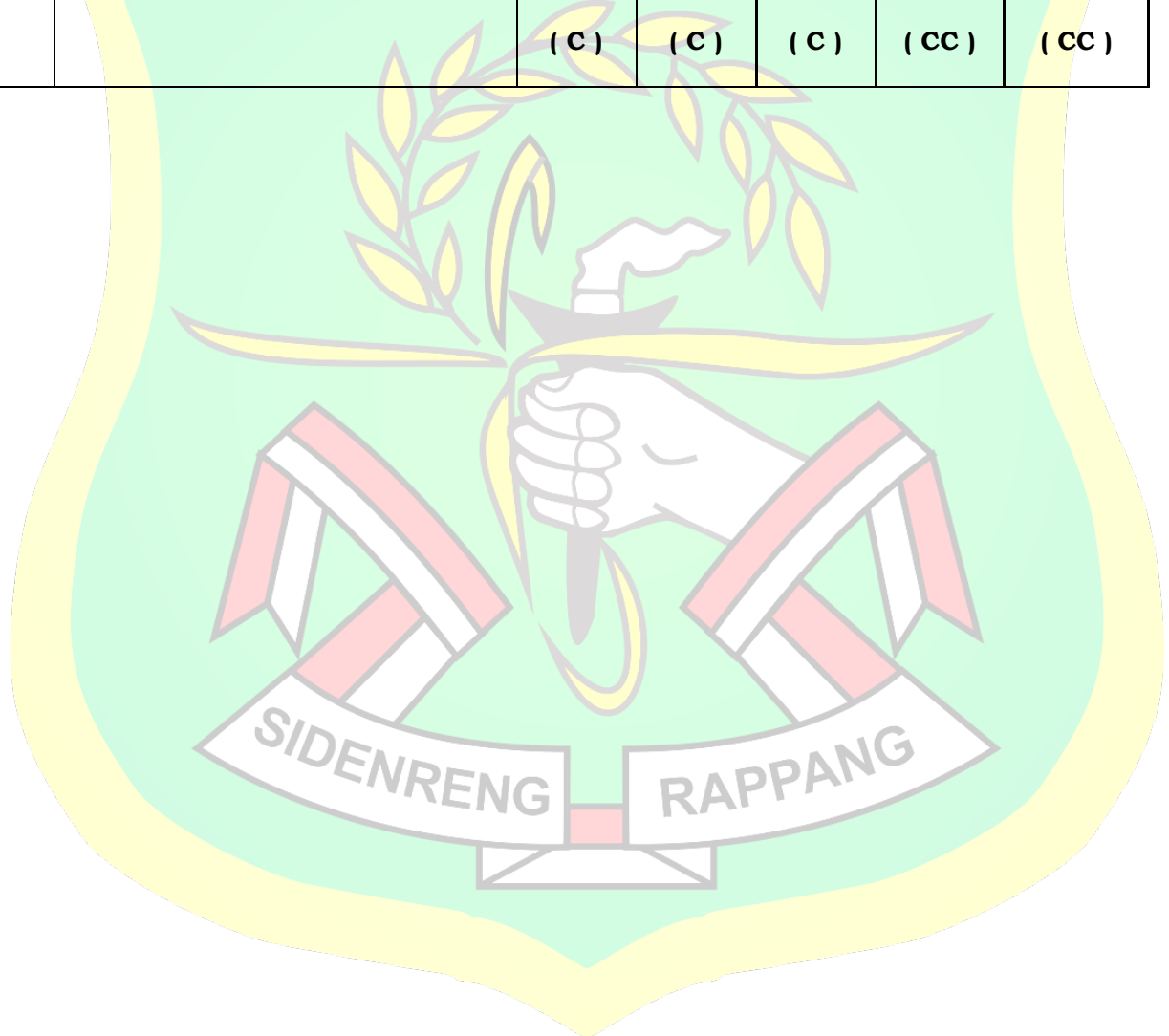
Perencanaan Kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

| Tujuan   | Sasaran Strategis                                      | Indikator   | 2023        |
|--|--|---|-------------|
| <b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b> |  | Indeks Kepuasan masyarakat  | 84,01       |
|  | Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan kecamatan   | Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100 %       |
|  | Meningkatnya kualitas layanan koordinasi               | Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan                   | 100 %       |
|  | Meningkatnya kualitas layanan pembinaan dan pengawasan | Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.                         | 100 %       |
|  | Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan          | Predikat Nilai Sakip.   | 50,75 ( C ) |

## 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Berikut IKU Kecamatan Dua Pitue :

| No. | Indikator   | Target         |                |                |                 |                 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023            | 2024            |
| 1   | 2   | 3              | 4              | 5              | 6               | 7               |
| 1.  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 77,59          | 81,09          | 82,45          | 84,01           | 85,59           |
| 2.  | Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 0              | 100            | 100 %          | 100 %           | 100 %           |
| 3.  | Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.                  | 0              | 72 %           | 73 %           | 74 %            | 100 %           |
| 4.  | Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.                         | 0              | 100 %          | 100 %          | 100 %           | 100 %           |
| 5.  | Predikat Nilai Sakip.   | 33,89<br>( C ) | 36,39<br>( C ) | 40,25<br>( C ) | 50,75<br>( CC ) | 58,80<br>( CC ) |



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 terkait skala Nilai Peringkat Kinerja adalah sebagai berikut :



Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri  
Nomor 86 Tahun 2017

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | 91 % ≤                           | Sangat Tinggi                        |
| 2.  | 76 % s.d 90 %                    | Tinggi                               |
| 3.  | 66 % s.d 75 %                    | Sedang                               |
| 4.  | 51 % s.d 65 %                    | Rendah                               |
| 5.  | 50 %                             | Rendah                               |

Capaian kinerja Kecamatan Dua PituE sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

### 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

**Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan.**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2023 “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

| <b>Tujuan</b>  |                            |                |           |         |
|--|----------------------------|----------------|-----------|---------|
| <b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b> |                            |                |           |         |
| No.  | Indikator                  | Target Kinerja | Realisasi | Capaian |
| 1.   | Indeks Kepuasan Masyarakat | 84,01          | 81,09     | 96 %    |

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 81,09 dari target sebesar 84,01 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 96 % atau mencapai melebihi target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :



### Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan

| No | Tujuan  | Tingkat Target Kinerja Sasaran | Tingkat Realisasi Target Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. | Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan | 84,01                          | 81,09                            | 2,92              |

Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pihak Bappelitbangda, yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Kecamatan Dua PituE diuraikan sebagai berikut :

#### Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Dua PituE Tahun 2021

| No. | Unit Layanan        | Important dan Performance |              |           | Nilai Interval | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-----|---------------------|---------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|------------------------|
|     |                     | Rata-rata Pelayanan       | Rata Harapan | Nilai GAP |                |                |                        |
| 1.  | Kecamatan Dua PituE | 3.24                      | 3.46         | 0.21      | 81.09          | B              | Baik                   |

#### Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2024 “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

| Sasaran 1<br>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum |   |                    |               |             |
|---|---|--------------------|---------------|-------------|
| No.   | Indikator   | Target Kinerja (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| 1.  | Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100                | 100           | 100         |

Capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 % dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau mencapai target.

## **Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi.**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2023 “Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

| <b>Sasaran 2</b>                                       |   |                           |                      |                    |
|--|---|---------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi</b> |   |                           |                      |                    |
| <b>No.</b>   | <b>Indikator</b>                                      | <b>Target Kinerja (%)</b> | <b>Realisasi (%)</b> | <b>Capaian (%)</b> |
| 1.   | Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan | 73,00                     | 62,5                 | 85,6               |

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan terhadap pelayanan kecamatan sebesar 62,5% dari target sebesar 73,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 85,6 % atau mencapai target.

## **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2023 “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

| <b>Sasaran 3</b>   |  |                       |                  |                |
|--|--|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan</b> |  |                       |                  |                |
| <b>No.</b>   | <b>Indikator</b>                               | <b>Target Kinerja</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
| 1.   | Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi | 100                   | 100              | 100            |

Capaian kinerja dari indikator “Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau mencapai target.

## **Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2022 “Predikat Nilai SAKIP” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

| <b>Sasaran 4</b>                                     |                      |                       |                  |                  |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</b> |                      |                       |                  |                  |
| <b>No.</b>   | <b>Indikator</b>     | <b>Target Kinerja</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian %</b> |
| 1.   | Predikat Nilai SAKIP | 50,75 (C)             | 53,35 (CC)       | 106 %            |

Yang dapat kami uraikan terkait dengan predikat Nilai Sakip adalah data Tahun 2021 yang telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan berdasarkan data hasil reviu dari Inspektorat untuk Tahun 2022, realisasi capaian untuk Predikat Nilai Sakip adalah CC dengan Nilai 53,35 (C) dari target Kecamatan Dua Pitue adalah Nilai CC dengan nilai 50,75 (CC). Data capaian tersebut melebihi dari yang kami targetkan sebesar 106 %

Capaian kinerja dari indikator predikat nilai sakip untuk tahun 2023 belum kami ketahui hasilnya. Hal ini dikarenakan predikat tersebut baru kami ketahui setelah pihak dari Inspektorat melakukan reviu atas laporan akhir tahun dari pemerintah kecamatan Dua Pitue pada Tahun 2023 setelah laporan ini kami sampaikan.

### **3.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2022 dan tahun lalu sebagai berikut :

| <b>Tujuan</b>  |                            |                  |             |
|--|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b> |                            |                  |             |
| <b>No.</b>   | <b>Indikator</b>           | <b>Realisasi</b> |             |
|  |                            | <b>2021</b>      | <b>2021</b> |
| 1.   | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81,09 ( B )      | 81,09 ( B ) |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat Dua Pitue mengalami peningkatan terkait kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan Dua Pitue. Pada tahun 2021 pemerintah kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81,09 %.

Berikut ini kami gambarkan perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun ini dengan tahun lalu.

#### Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat 2021

| No. | Unit Layanan | Important dan Performance |              |           | Nilai Interval | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|-----|--------------|---------------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|------------------------|
|     |              | Rata-rata Pelayanan       | Rata Harapan | Nilai GAP |                |                |                        |
| 1.  | 2021         | 3,31                      | 3,52         | 0,21      | 81,09          | B              | Baik                   |

#### Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

| Sasaran 1  |   |           |       |
|--|---|-----------|-------|
| Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum |   |           |       |
| No.  | Indikator   | Realisasi |       |
|  |   | 2022      | 2023  |
| 1.   | Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100 %     | 100 % |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran 1 dengan indikator persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik, memiliki data capaian di tahun 2022 sebesar 100 % karena belum di programkan di tahun tersebut sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2023 sebesar 100 %. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah kecamatan selalu mengutamakan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat Kecamatan Dua Pitue. Untuk mencapai indikator sasaran tersebut pemerintah kecamatan Dua Pitue membuka pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan.

#### Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi.

Sasaran layanan urusan koordinasi diukur melalui kegiatan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

| Sasaran 2                                       |   |           |          |
|---|---|-----------|----------|
| Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi |   |           |          |
| No.   | Indikator   | Realisasi |          |
|   |   | 2022 (%)  | 2023 (%) |
| 1.  | Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan | 100       | 100      |

Realisasi capaian untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan di tahun 2022 sebesar 85,6 % dan di tahun 2023 sebesar 62,50 %. Terkait dengan pencapaian tersebut, pemerintah kecamatan Dua Pitue setiap tahunnya selalu mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pemerintah desa. Untuk pencapaian di tahun 2023 sebesar 62,50 % hal ini mengacu pada indikator tingkat partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan. Hasil yang dicapai terkait tingkat partisipasi masyarakat sangat menurun pada kegiatan Musrenbang dan Tudang Sipulung dimana tingkat kehadiran masyarakat yang diundang sangat minim.

**Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan.**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

| <b>Sasaran 3</b>   |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
| <b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan</b> |  |           |      |
| No.  | Indikator                                      | Realisasi |      |
|  |  | 2022      | 2023 |
| 1.   | Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi | 100       | 100  |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi adalah untuk tahun 2022 dengan capaian 100% dan capaian di tahun 2023 juga sebesar 100 %.

**Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

| <b>Sasaran 4</b>                                     |                      |           |          |
|--|----------------------|-----------|----------|
| <b>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan</b> |                      |           |          |
| No.  | Indikator            | Realisasi |          |
|  |                      | 2021 (%)  | 2022 (%) |
| 1.   | Predikat Nilai SAKIP | 42,63     | 53,35    |

Realisasi capaian untuk indikator Predikat Nilai Sakip dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2021 dengan capaian 42,63% meningkat ditahun 2022 menjadi 53,35 %.



### 3.1.3 Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD dan RENSTRA :

| Tujuan  |                            |           |           |           |
|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan |                            |           |           |           |
| No.   | Indikator Kinerja          | Target    |           | Realisasi |
|   |                            | RPJMD     | Renstra   | 2021      |
| 1.  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 84,32 (B) | 84,01 (B) | 81,09 (B) |

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dengan target jangka menengah dengan nilai 84,32 (B) dan target Renstra dengan nilai 84,01 (B).

Sedangkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk tahun 2023, tidak dilakukan survey di kecamatan.

#### Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

| Sasaran 1  |  |           |             |           |
|--|--|-----------|-------------|-----------|
| Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum |  |           |             |           |
| No.  | Indikator Kinerja  | Target    |             | Realisasi |
|  |  | RPJMD (%) | Renstra (%) | 2023 (%)  |
| 1.   | Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik. | 100       | 100         | 100       |

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik tahun 2023 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %.



Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Dua PituE untuk indikator persentase layanan urusan pemerintahan yang dijalankan dengan baik belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Dua PituE dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2023 juga tidak mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Indikator realisasi tahun 2023, kami mengacu pada hasil survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan pemerintah kecamatan Dua PituE. Adapun formulasi pencapaian target untuk indikator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\frac{3 \text{ urusan}}{3 \text{ Urusan}}} \times 100 \%$$

## Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi

Terkait Dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dalam pencapaian indicator sarasanya diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

| Sasaran 2                                       |   |           |             |           |
|---|---|-----------|-------------|-----------|
| Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Koordinasi |   |           |             |           |
| No.   | Indikator Kinerja                                     | Target    |             | Realisasi |
|   |   | RPJMD (%) | Renstra (%) | 2023 (%)  |
| 1.  | Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan | 72        | 73          | 62,5      |

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan tahun 2023 dengan target jangka menengah

dengan nilai 72 % dan target Renstra dengan nilai 73 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Dua PituE terkait kegiatan yang dikoordinasikan di pemerintah kecamatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasi Kecamatan Dua PituE hanya sebesar 62,5%. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 73 %, maka realisasi tahun 2023 juga tidak mencapai target. Adapun formulasi pencapaian target untuk indikator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan}}{\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan}}{\frac{3 \text{ Kegiatan}}{3 \text{ Kegiatan}}} \times 100 \%$$

Kegiatan yang dikoordinasikan adalah adalah terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat desa kami ukur dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. Adapun tingkat partisipasi masyarakat di tahun 2023 melalui kegiatan musrenbang dengan tingkat partisipasi sebesar 75 % dan tudang sipulung adalah 50 % dengan demikian tingkat realisasi secara keseluruhan dari kedua kegiatan tersebut adalah sebesar 62,5 % dan tidak mencapai target yang ditentukan.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

| Sarasran 3  |  |           |             |           |
|---|--|-----------|-------------|-----------|
| Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan |  |           |             |           |
| No.   | Indikator Kinerja                              | Target    |             | Realisasi |
|   |  | RPJMD (%) | Renstra (%) | 2023 (%)  |
| 1.  | Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi | 100       | 100         | 100       |

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi tahun 2023 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Dua PituE telah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Dua PituE dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2023 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Pencapaian target untuk indikator ini didapat dari formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} &= \frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \% \\ \text{Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi} &= \frac{8 \text{ Desa}}{8 \text{ Desa}} \times 100 \% \end{aligned}$$

Adapun jumlah desa di kecamatan Dua PituE adalah 8 desa yaitu desa Padangloang, Padangloang Alau, Salobukkang, Kalosi, Taccimpo, Bila , Kalosi Alau dan Kampale.

#### **Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Predikat Nilai Sakip kami perbandingkan dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah dan Renstra. Terkait dengan predikat nilai sakip untuk Tahun Anggaran 2023 belum diketahui tingkat realisasinya, hal ini dikarenakan Sakip untuk Tahun 2023 baru akan reuiu oleh Tim Kerja dari Inspektorat Kabupaten selaku Tim Reuiu. Berikut ini kami perbandingkan Predikat Nilai Sakip Tahun 2022 dengan target RPJMD dan Renstra pada tabel di bawah ini :

| <b>Sasaran 4</b>                                     |                          |                  |                    |                  |
|--|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan</b> |                          |                  |                    |                  |
| <b>No.</b>   | <b>Indikator Kinerja</b> | <b>Target</b>    |                    | <b>Realisasi</b> |
|  |                          | <b>RPJMD (%)</b> | <b>Renstra (%)</b> | <b>2023 (%)</b>  |
| 1.   | Predikat nilai SAKIP     | B                | C                  | CC               |

Capaian realisasi untuk predikat nilai sakin untuk tahun 2022 adalah 53,35 ( CC ) sedangkan untuk hasil predikat nilai sakin untuk tahun 2023 belum ada karena baru akan direviu di tahun 2024

### **3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Dua Pitue yang cukup maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja Tahun 2023 adalah penetapan target kinerja di Renstra yang tidak terlalu tinggi dengan melihat kondisi dari kecamatan Dua Pitue.

Terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja terhadap target renstra, pencapaian target sesuai dengan target RPJMD tidak mencapai target. Adapun penyebab tidak tercapainya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 terdapat nilai indikator yang rendah yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu:

1. Perbaiki Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan.
2. Peningkatan kualitas SDM Pelayanan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Berdasarkan hasil survey terkait kepuasan masyarakat Kecamatan Dua Pitue yang masih kurang memuaskan atau kurang baik akan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Dua Pitue.

Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses koordinasi dibidang pemerintahan dan pembangunan, penyebab tidak mencapai target adalah adanya kejenuhan oleh masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Seperti halnya kegiatan Musrenbang, tingkat kehadiran masyarakat setiap tahunnya terus menurun, hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya kejenuhan dari kegiatan tersebut yang mana hasil yang diharapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan harapan dan persepsi mereka. Demikian halnya dengan kegiatan Musyawarah tudang Sipulung tingkat kehadiran peserta tudang sipulung ditingkat kecamatan juga menurun. Kedua



kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan menjadi salah satu tolak ukur kami dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan koordinasi dengan masyarakat.

### 3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber dana.

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. Setelah penetapan anggaran tersebut dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dengan adanya rasionalisasi anggaran. Adapun anggaran tersebut sebagai berikut :

| No. | Uraian                 | Anggaran (Rp.) |
|-----|------------------------|----------------|
| 1.  | DPA Awal tahun 2023    | 3.104.144.000  |
| 2.  | DPPA Perubahan Pertama | 3.104.144.000  |
| 3.  | DPPA Perubahan Kedua   | 2.741.464.000  |

Anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 4 Program sebesar Rp. 3.104.144.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.741.464.000 atau 97 %.

Anggaran tahun 2023 dialokasikan untuk menopang sasaran keempat tujuan dan sasaran Kecamatan Dua PituE yaitu :

|    |           |   |   |
|----|-----------|---|---|
| 1. | Tujuan    | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      |   |
| 2. | Sasaran 1 | : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan   | Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan baik |
| 3. | Sasaran 2 | : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Koordinasi               | Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan                   |
| 4. | Sasaran 3 | : Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan | Persentase Jumlah Desa yang dibina                                      |
| 5. | Sasaran 4 | : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan                 | Predikat Nilai Sakip  |

### **3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Belch, 2004).

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
    1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.
    2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
    1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
  - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
    1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan aset Desa.
    2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
    3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu 1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Administrasi Umum Perangkat daerah
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
    2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  4. Fasilitas/Kunjungan Tamu
  5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Kecamatan Dua Pitue Tahun 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ke dua sebesar Rp. 3.104.144.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 2.511.318.700,- dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 230.145.300,- dengan realisasi belanja Rp. 2.660.353.507,- atau sebesar 97 % sesuai tabel di bawah ini :

| No. | Uraian                                  | Anggaran (Rp.)         | Realisasi (Rp.)        |
|-----|---|------------------------|------------------------|
| 1.  | Belanja Operasi                         | 2.511.318.700,-        | 2.430.208.207,-        |
| 2.  | Belanja Modal                           | 230.145.300,-          | 230.145.300,-          |
|     | <b>Total Anggaran Setelah Perubahan</b> | <b>2.741.464.000,-</b> | <b>2.660.353.507,-</b> |

Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintah Kecamatan, sasaran Meningkatnya Kualitas Urusan Koordinasi dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan untuk tahun 2023 belum dianggarkan di DPA/DPPA karena anggaran yang tidak mencukupi. Namun kegiatan yang mendukung ketiga sasaran tersebut diakomodir melalui anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Karena kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian ketiga sasaran tersebut merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, kemudian disusun direnstra perubahan sebagai salah satu

sasaran yang harus tersurat melalui dokumen perencanaan untuk mengakomodir kegiatan para Kepala Seksi di lingkup Pemerintah Kecamatan.



**LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK / KEUANGAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

**SKPD : KECAMATAN DUA PITUE**

| PROGRAM / KEGIATAN                               | NILAI DPA<br>(Rp)    | JUMLAH<br>REALISASI  | REALISASI   |                | SISA ANGGARAN<br>( Rp ) | KET |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----|
|  |                      | (Rp)                 | FISIK ( % ) | KEUANGAN ( % ) |                         |     |
| 1  | 2                    | 3                    | 4           | 5              | 6                       | 10  |
| <b>BELANJA</b>                                   | <b>2,741,464,000</b> |                      |             |                | <b>81,110,493</b>       |     |
| <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                    | <b>1,848,252,000</b> | <b>1,786,960,820</b> |             | <b>817</b>     | <b>61,291,180</b>       |     |
| <b>Belanja Pegawai</b>                           | <b>1,848,252,000</b> | <b>1,786,960,820</b> | <b>0</b>    | <b>817</b>     | <b>61,291,180</b>       |     |
| <b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>                | <b>1,632,627,000</b> | <b>1,574,165,830</b> | <b>0</b>    | <b>719</b>     | <b>58,461,170</b>       |     |
| Gaji Pokok PNS/Uang Representasi                 | 1,268,256,140        | 1,230,854,153        | <b>0</b>    | 97             | <b>Rp 37,401,987</b>    |     |
| Tunjangan Keluarga                               | 87,207,000           | 83,253,276           | <b>0</b>    | 95             | <b>Rp 3,953,724</b>     |     |
| Tunjangan Jabatan                                | 146,140,000          | 140,140,000          | <b>0</b>    | 96             | <b>Rp 6,000,000</b>     |     |
| Tunjangan Fungsional Umum                        | 18,135,000           | 15,145,000           | <b>0</b>    | 84             | <b>Rp 2,990,000</b>     |     |
| Tunjangan Beras                                  | 51,374,000           | 48,448,980           | <b>0</b>    | 94             | <b>Rp 2,925,020</b>     |     |
| Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus                   | 9,164,860            | 6,127,487            | <b>0</b>    | 67             | <b>Rp 3,037,373</b>     |     |
| Pembulatan Gaji                                  | 17,000               | 15,261               | <b>1</b>    | 90             | <b>Rp 1,739</b>         |     |
| Iuran Asuransi Kesehatan                         | 52,333,000           | 50,181,673           | <b>0</b>    | 96             | <b>Rp 2,151,327</b>     |     |
| <b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>          | <b>215,625,000</b>   | <b>212,794,990</b>   | <b>0</b>    | <b>99</b>      | <b>2,830,010</b>        |     |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 215,625,000          | 212,794,990          | <b>0</b>    | 99             | <b>Rp 2,830,010</b>     |     |

|  |                    |                    |          |              |                  |   |
|--|--------------------|--------------------|----------|--------------|------------------|---|
| <b>KECAMATAN DUA PITUE</b>   |                    |                    |          |              |                  |   |
| <b>BELANJA LANGSUNG</b>  | <b>290,172,000</b> | <b>284,402,000</b> | <b>0</b> | <b>2,596</b> | <b>5,770,000</b> |   |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                           | <b>235,172,000</b> | <b>234,402,000</b> | <b>0</b> | <b>2,596</b> | <b>770,000</b>   |   |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                      | <b>500,000</b>     | <b>500,000</b>     |          | <b>200</b>   | <b>0</b>         |   |
| <b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b> | <b>500,000</b>     | <b>500,000</b>     | <b>0</b> | <b>200</b>   | <b>0</b>         |   |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                   | 99,000             | 99,000             | <b>0</b> | 100          | <b>Rp</b>        | - |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 401,000            | 401,000            | <b>0</b> | 100          | <b>Rp</b>        | - |
|  |                    |                    |          |              |                  |   |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>98,734,300</b>  | <b>98,039,300</b>  |          | <b>497</b>   | <b>695,000</b>   |   |
| <b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>                      | <b>480,000</b>     | <b>480,000</b>     | <b>0</b> | <b>100</b>   | <b>0</b>         |   |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik  | 480,000            | 480,000            | <b>0</b> | 100          | <b>Rp</b>        | - |
|  |                    |                    |          |              |                  |   |
| <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>  | <b>61,462,000</b>  | <b>61,462,000</b>  | <b>0</b> | <b>200</b>   | <b>0</b>         |   |
| Belanja Modal Personal Komputer  | 27,930,000         | 27,930,000         | <b>0</b> | 100          | <b>Rp</b>        | - |
| Belanja Modal Peralatan Personal Komputer  | 7,750,000          | 7,750,000          | <b>0</b> | 100          | <b>Rp</b>        | - |
| Belanja Pakaian Olahraga   | 3,600,000          | 3,600,000          | <b>0</b> | 100          | <b>Rp</b>        | - |
| Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  | 7,182,000          | 7,182,000          | <b>0</b> | 100          | <b>Rp</b>        | - |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga  | 15,000,000         | 15,000,000         | <b>0</b> | 100          | <b>Rp</b>        | - |
|  |                    |                    |          |              |                  |   |
| <b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>   | <b>3,547,300</b>   | <b>3,547,300</b>   | <b>-</b> | <b>100</b>   | <b>0</b>         |   |
| Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor                                      | 386,000            | 386,000            | <b>0</b> | 100          | <b>Rp</b>        | - |
| Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (HomeUse)  | 3,161,300          | 3,161,300          | <b>0</b> | 100          | <b>Rp</b>        | - |
|  |                    |                    |          |              |                  |   |

|   |                    |                    |          |              |           |                |
|---|--------------------|--------------------|----------|--------------|-----------|----------------|
| <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>               | <b>33,245,000</b>  | <b>32,550,000</b>  | <b>0</b> | <b>197</b>   |           | <b>695,000</b> |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa  | 20,145,000         | 19,450,000         | 0        | 97           | <b>Rp</b> | <b>695,000</b> |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                       | 13,100,000         | 13,100,000         | 0        | 100          | <b>Rp</b> | -              |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>10,826,000</b>  | <b>10,826,000</b>  | <b>0</b> | <b>300</b>   |           | <b>0</b>       |
| <b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b> | <b>10,826,000</b>  | <b>10,826,000</b>  | <b>0</b> | <b>300</b>   |           | <b>0</b>       |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas               | 200,000            | 200,000            | 0        | 100          | <b>Rp</b> | -              |
| Belanja Modal Mesin Bor   | 0                  | 0                  | -        | 0            | <b>Rp</b> | -              |
| Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat                                    | 3,126,000          | 3,126,000          | 0        | 100          | <b>Rp</b> | -              |
| Belanja Modal Mebel   | 7,500,000          | 7,500,000          | 0        | 100          | <b>Rp</b> | -              |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>               | <b>100,905,200</b> | <b>100,905,200</b> | <b>0</b> | <b>1,300</b> |           | <b>0</b>       |
| <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>                                     | <b>500,000</b>     | <b>500,000</b>     | <b>0</b> | <b>100</b>   |           | <b>0</b>       |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                        | 500,000            | 500,000            | 0        | 100          | <b>Rp</b> | -              |
| <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>            | <b>30,828,000</b>  | <b>30,828,000</b>  | <b>0</b> | <b>200</b>   |           | <b>0</b>       |
| Belanja Tagihan Listrik   | 24,420,000         | 24,420,000         | 0        | 100          | <b>Rp</b> | -              |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                          | 4,800,000          | 4,800,000          | 0        | 100          | <b>Rp</b> | -              |
| Belanja Tagihan Air   | 1,608,000          | 1,608,000          | 0        | 100          | <b>Rp</b> | -              |
| <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                              | <b>69,577,200</b>  | <b>69,577,200</b>  | <b>0</b> | <b>1,000</b> |           | <b>0</b>       |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                | 4,892,200          | 4,892,200          | 0        | 100          | <b>Rp</b> | -              |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover                 | 4,422,000          | 4,422,000          | 0        | 100          | <b>Rp</b> | -              |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak                      | 1,639,000          | 1,639,000          | 0        | 100          | <b>Rp</b> | -              |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan                            | 424,000            | 424,000            | 0        | 100          | <b>Rp</b> | -              |



|   |                   |                   |          |            |    |               |
|---|-------------------|-------------------|----------|------------|----|---------------|
| Komputer  |                   |                   |          |            |    |               |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 15,200,000        | 15,200,000        | 0        | 100        | Rp | -             |
| Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0                 | 0                 | -        | 0          | Rp | -             |
| Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer   | 24,000,000        | 24,000,000        | 0        | 100        | Rp | -             |
| Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 6,000,000         | 6,000,000         | 0        | 100        | Rp | -             |
| Belanja Jasa Tenaga Supir   | 6,000,000         | 6,000,000         | 0        | 100        | Rp | -             |
| Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya  | 4,000,000         | 4,000,000         | 0        | 100        | Rp | -             |
| Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya   | 3,000,000         | 3,000,000         | 0        | 100        | Rp | -             |
|   |                   |                   |          |            |    |               |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>24,206,500</b> | <b>24,131,500</b> | <b>0</b> | <b>500</b> |    | <b>75,000</b> |
| <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | <b>20,174,000</b> | <b>20,099,000</b> | <b>0</b> | <b>300</b> |    | <b>75,000</b> |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 19,175,000        | 19,100,000        | 0        | 100        | Rp | 75,000        |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                       | 555,000           | 555,000           | 0        | 100        | Rp | -             |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Darat Bermotor Lainnya                          | 444,000           | 444,000           | 0        | 100        | Rp | -             |
|   |                   |                   |          |            |    |               |
|   |                   |                   |          |            |    |               |
| <b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>   | <b>1,700,000</b>  | <b>1,700,000</b>  | <b>0</b> | <b>100</b> |    | <b>0</b>      |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Lainnya   | 1,000,000         | 1,000,000         | 0        | 100        | Rp | -             |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Pendingin  | 700,000           | 700,000           | 0        | 100        | Rp | -             |
|   |                   |                   |          |            |    |               |
| <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>   | <b>2,332,500</b>  | <b>2,332,500</b>  | <b>0</b> | <b>100</b> |    | <b>0</b>      |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi   | 2,332,500         | 2,332,500         | 0        | 100        | Rp | -             |
|   |                   |                   |          |            |    |               |

|   |                   |                   |          |            |                     |  |
|---|-------------------|-------------------|----------|------------|---------------------|--|
| <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>                            | <b>50,800,000</b> | <b>50,000,000</b> | -        | 0          | <b>800,000</b>      |  |
| <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                        | <b>50,800,000</b> | <b>50,000,000</b> | -        | 0          | <b>800,000</b>      |  |
| <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan</b>                    | <b>400,000</b>    | <b>0</b>          | -        | 0          | <b>400,000</b>      |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 400,000           | 0                 | -        | 0          | <b>Rp 400,000</b>   |  |
| <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan</b> | <b>50,400,000</b> | <b>50,000,000</b> | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>400,000</b>      |  |
| Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                    | 50,000,000        | 50,000,000        | 0        | 100        | <b>Rp -</b>         |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 400,000           | 0                 | -        | 0          | <b>Rp 400,000</b>   |  |
| <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>                                   | <b>1,000,000</b>  | <b>0</b>          | -        | <b>0</b>   | <b>1,000,000</b>    |  |
| <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | <b>1,000,000</b>  | <b>0</b>          | -        | <b>0</b>   | <b>1,000,000</b>    |  |
| <b>Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>        | <b>600,000</b>    | <b>0</b>          | -        | <b>0</b>   | <b>600,000</b>      |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 600,000           | 0                 | -        | 0          | <b>Rp 600,000</b>   |  |
| <b>Evaluasi Kelurahan</b>   | <b>400,000</b>    | <b>0</b>          | -        | <b>0</b>   | <b>400,000</b>      |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 400,000           | 0                 | -        | 0          | <b>Rp 400,000</b>   |  |
| <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                   | <b>3,200,000</b>  | <b>0</b>          | -        | <b>0</b>   | <b>3,200,000</b>    |  |
| <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>    | <b>3,200,000</b>  | <b>0</b>          | -        | <b>0</b>   | <b>3,200,000</b>    |  |
| <b>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>                     | <b>1,400,000</b>  | <b>0</b>          | -        | <b>0</b>   | <b>1,400,000</b>    |  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 1,400,000         | 0                 | -        | 0          | <b>Rp 1,400,000</b> |  |
| <b>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang Difasilitasi</b> | <b>1,000,000</b>  | <b>0</b>          | -        | <b>0</b>   | <b>1,000,000</b>    |  |

|  |                   |                   |          |              |    |                   |
|--|-------------------|-------------------|----------|--------------|----|-------------------|
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                | 1,000,000         | 0                 | -        | 0            | Rp | 1,000,000         |
| <b>Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>  | <b>800,000</b>    | <b>0</b>          | <b>-</b> | <b>0</b>     |    | <b>800,000</b>    |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                | 800,000           | 0                 | -        | 0            | Rp | 800,000           |
| <b>KELURAHAN SALOMALLORI</b>                                       |                   |                   |          |              |    |                   |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>90,759,000</b> | <b>80,232,687</b> | <b>0</b> | <b>1,605</b> |    | <b>10,526,313</b> |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          | <b>33,541,000</b> | <b>26,586,000</b> |          | <b>309</b>   |    | <b>6,955,000</b>  |
| <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</b> | <b>9,000,000</b>  | <b>9,000,000</b>  | <b>0</b> | <b>200</b>   |    | <b>0</b>          |
| Baju Seragam   | 4,500,000         | 4,500,000         | 0        | 100          | Rp | -                 |
| Seragam Panitia Lomba  | 4,500,000         | 4,500,000         | 0        | 100          | Rp | -                 |
| <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                | <b>9,766,000</b>  | <b>9,766,000</b>  | <b>0</b> | <b>200</b>   |    | <b>0</b>          |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik              | 722,000           | 722,000           | 0        | 100          | Rp | -                 |
| Belanja Modal Mebel  | 9,044,000         | 9,044,000         | 0        | 100          | Rp | -                 |
| <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>        | <b>14,775,000</b> | <b>7,820,000</b>  | <b>0</b> | <b>109</b>   |    | <b>6,955,000</b>  |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                     | 4,775,000         | 2,820,000         | 0        | 59           | Rp | 1,955,000         |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                | 10,000,000        | 5,000,000         | 0        | 50           | Rp | 5,000,000         |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>        | <b>50,673,000</b> | <b>47,101,687</b> | <b>0</b> | <b>896</b>   |    | <b>3,571,313</b>  |
| <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>                              | <b>1,600,000</b>  | <b>1,600,000</b>  | <b>0</b> | <b>100</b>   |    | <b>0</b>          |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                 | 1,600,000         | 1,600,000         | 0        | 100          | Rp | -                 |
| <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>     | <b>10,644,000</b> | <b>7,072,687</b>  | <b>0</b> | <b>196</b>   |    | <b>3,571,313</b>  |

|  |                    |                    |          |            |    |           |   |
|--|--------------------|--------------------|----------|------------|----|-----------|---|
| Belanja Tagihan Air  | 804,000            | 625,500            | 0        | 78         | Rp | 178,500   |   |
| Belanja Tagihan Listrik  | 3,600,000          | 1,247,937          | 0        | 35         | Rp | 2,352,063 |   |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan   | 6,240,000          | 5,199,250          | 0        | 83         | Rp | 1,040,750 |   |
|  |                    |                    |          |            |    |           |   |
| <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>   | <b>38,429,000</b>  | <b>38,429,000</b>  | <b>0</b> | <b>600</b> |    | <b>0</b>  | - |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 5,867,400          | 5,867,400          | 0        | 100        | Rp | -         |   |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover  | 3,803,100          | 3,803,100          | 0        | 100        | Rp | -         |   |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 1,258,500          | 1,258,500          | 0        | 100        | Rp | -         |   |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 3,500,000          | 3,500,000          | 0        | 100        | Rp | -         |   |
| Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer  | 18,000,000         | 18,000,000         | 0        | 100        | Rp | -         |   |
| Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya  | 6,000,000          | 6,000,000          | 0        | 100        | Rp | -         |   |
|  |                    |                    |          |            |    |           |   |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>6,545,000</b>   | <b>6,545,000</b>   | <b>0</b> | <b>400</b> |    | <b>0</b>  |   |
| <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b> | <b>4,545,000</b>   | <b>4,545,000</b>   | <b>0</b> | <b>300</b> |    | <b>0</b>  |   |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 3,250,000          | 3,250,000          | 0        | 100        | Rp | -         |   |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                  | 925,000            | 925,000            | 0        | 100        | Rp | -         |   |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Darat Bermotor Lainnya                     | 370,000            | 370,000            | 0        | 100        | Rp | -         |   |
|  |                    |                    |          |            |    |           |   |
| <b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>  | <b>2,000,000</b>   | <b>2,000,000</b>   | <b>0</b> | <b>100</b> |    | <b>0</b>  |   |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Lainnya  | 2,000,000          | 2,000,000          | 0        | 100        | Rp | -         |   |
|  |                    |                    |          |            |    |           |   |
| <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>  | <b>181,481,000</b> | <b>181,481,000</b> | <b>0</b> | <b>300</b> |    | <b>0</b>  |   |
| <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>   | <b>181,481,000</b> | <b>181,481,000</b> | <b>0</b> | <b>300</b> |    | <b>0</b>  |   |
| <b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>  | <b>75,041,000</b>  | <b>75,041,000</b>  | <b>0</b> | <b>200</b> |    | <b>0</b>  |   |

|  |                    |                    |          |              |    |                   |
|--|--------------------|--------------------|----------|--------------|----|-------------------|
| Belanja Modal Jalan Kabupaten                                      | 59,024,000         | 59,024,000         | 0        | 100          | Rp | -                 |
| Belanja Modal Jalan Kota   | 16,017,000         | 16,017,000         | 0        | 100          | Rp | -                 |
| <b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>                        | <b>106,440,000</b> | <b>106,440,000</b> | <b>0</b> | <b>100</b>   |    | <b>0</b>          |
| Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain         | 106,440,000        | 106,440,000        | 0        | 100          | Rp | -                 |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>272,240,000</b> | <b>261,713,687</b> |          |              |    | <b>10,526,313</b> |
| <b>KELURAHAN TANRUTEDONG</b>                                       |                    |                    |          |              |    |                   |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>120,634,000</b> | <b>117,111,000</b> | <b>0</b> | <b>2,058</b> |    | <b>3,523,000</b>  |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          | <b>50,595,500</b>  | <b>48,352,500</b>  |          | <b>678</b>   |    | <b>2,243,000</b>  |
| <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</b> | <b>9,000,000</b>   | <b>9,000,000</b>   | -        | <b>0</b>     |    | <b>0</b>          |
| Baju Seragam   | 4,500,000          | 4,500,000          | 0        | 100          | Rp | -                 |
| Seragam Panitia Lomba  | 4,500,000          | 4,500,000          | 0        | 100          | Rp | -                 |
| <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                | <b>23,325,000</b>  | <b>23,325,000</b>  | <b>0</b> | <b>400</b>   |    | <b>0</b>          |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik              | 3,325,000          | 3,325,000          | 0        | 100          | Rp | -                 |
| Belanja Modal Mebel  | 6,125,000          | 6,125,000          | 0        | 100          | Rp | -                 |
| Belanja Modal Personal Komputer                                    | 10,000,000         | 10,000,000         | 0        | 100          | Rp | -                 |
| Belanja Modal Peralatan Personal Komputer                          | 3,875,000          | 3,875,000          | 0        | 100          | Rp | -                 |
| <b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>                           | <b>1,545,500</b>   | <b>1,545,500</b>   | <b>0</b> | <b>100</b>   |    | <b>0</b>          |
| Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor            | 1,545,500          | 1,545,500          | 0        | 100          | Rp | -                 |
| <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>        | <b>16,725,000</b>  | <b>14,482,000</b>  | <b>0</b> | <b>178</b>   |    | <b>2,243,000</b>  |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                     | 4,775,000          | 4,532,000          | 0        | 95           | Rp | 243,000           |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                | 11,950,000         | 9,950,000          | 0        | 83           | Rp | 2,000,000         |



|   |                   |                   |          |            |                  |           |
|---|-------------------|-------------------|----------|------------|------------------|-----------|
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>64,092,500</b> | <b>62,812,500</b> | <b>0</b> | <b>979</b> | <b>1,280,000</b> |           |
| <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>   | <b>1,500,000</b>  | <b>1,500,000</b>  | <b>0</b> | <b>100</b> | <b>0</b>         |           |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  | 1,500,000         | 1,500,000         | 0        | 100        | Rp               | -         |
| <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>  | <b>11,640,000</b> | <b>10,360,000</b> | <b>0</b> | <b>279</b> | <b>1,280,000</b> |           |
| Belanja Tagihan Air   | 600,000           | 600,000           | 0        | 100        | Rp               | -         |
| Belanja Tagihan Listrik   | 4,800,000         | 4,800,000         | 0        | 100        | Rp               | -         |
| Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  | 6,240,000         | 4,960,000         | 0        | 79         | Rp               | 1,280,000 |
| <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>  | <b>50,952,500</b> | <b>50,952,500</b> | <b>0</b> | <b>600</b> | <b>0</b>         | -         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  | 6,161,600         | 6,161,600         | 0        | 100        | Rp               | -         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover   | 4,204,400         | 4,204,400         | 0        | 100        | Rp               | -         |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 1,086,500         | 1,086,500         | 0        | 100        | Rp               | -         |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 3,500,000         | 3,500,000         | 0        | 100        | Rp               | -         |
| Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer   | 30,000,000        | 30,000,000        | 0        | 100        | Rp               | -         |
| Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya   | 6,000,000         | 6,000,000         | 0        | 100        | Rp               | -         |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>5,946,000</b>  | <b>5,946,000</b>  | <b>0</b> | <b>400</b> | <b>0</b>         |           |
| <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | <b>3,946,000</b>  | <b>3,946,000</b>  | <b>0</b> | <b>300</b> | <b>0</b>         |           |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 3,250,000         | 3,250,000         | 0        | 100        | Rp               | -         |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                       | 474,000           | 474,000           | 0        | 100        | Rp               | -         |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Darat Bermotor Lainnya                          | 222,000           | 222,000           | 0        | 100        | Rp               | -         |

|   |                      |                      |          |            |           |                   |
|---|----------------------|----------------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| <b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                       | <b>2,000,000</b>     | <b>2,000,000</b>     | <b>0</b> | <b>100</b> |           | <b>0</b>          |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Lainnya | 2,000,000            | 2,000,000            | 0        | 100        | <b>Rp</b> | -                 |
| <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>             | <b>210,166,000</b>   | <b>210,166,000</b>   | <b>0</b> | <b>300</b> |           | <b>0</b>          |
| <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                | <b>210,166,000</b>   | <b>210,166,000</b>   | <b>0</b> | <b>300</b> |           | <b>0</b>          |
| <b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>                     | <b>51,166,000</b>    | <b>51,166,000</b>    | <b>0</b> | <b>200</b> |           | <b>0</b>          |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak                  | 80,000               | 80,000               | 0        | 100        | <b>Rp</b> | -                 |
| Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten                           | 51,086,000           | 51,086,000           | 0        | 100        | <b>Rp</b> | -                 |
| <b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>                           | <b>159,000,000</b>   | <b>159,000,000</b>   | <b>0</b> | <b>100</b> |           | <b>0</b>          |
| Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain            | 159,000,000          | 159,000,000          | 0        | 100        | <b>Rp</b> | -                 |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>330,800,000</b>   | <b>327,277,000</b>   |          |            |           | <b>3,523,000</b>  |
| <b>JUMLAH TOTAL</b>   | <b>2,741,464,000</b> | <b>2,660,353,507</b> | <b>0</b> | <b>97</b>  |           | <b>81,110,493</b> |

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja**

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Dua PituE kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

#### ***Simpulan Umum atas Capaian Kinerja***

| <b>NO</b> | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>CAPAIAN</b> | <b>KRITERIA</b> |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| 1.        | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 81,09          | Tinggi          |
| 2.        | Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100,00%        | Sangat Tinggi   |
| 3.        | Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan.                  | 85,6 %         | Tinggi          |
| 4.        | Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.                         | 100,00 %       | Sangat Tinggi   |
| 5.        | Predikat Nilai Sakip (2022)   | 53,35          | Rendah          |

### **4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja**

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Dua PituE kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
3. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan

Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang

